

ANALISA PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU (2009-2013)

Desi Anita dan Dina Mariana Manalu
Program Studi S1-Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. A. Yani No. 78 – 88 Pekanbaru 28127

ABSTRACT

Regional autonomy is a regional empowerment in decision-making areas more flexibility to manage its resources with the potential and interests of the region itself and not rely on central subsidies. With extensive regional autonomy, real and responsible, each county is required to be able to explore the sources of finance in the region. Wherein the level of local revenue can mnenggambarkan economic growth of an area, predominantly, the sources of income of the area consists of three types of PAD, DBH and Income Other Legal, and therefore the purpose of this study was to determine how much growth and contributions PAD, DBH and Other Income The Sah. This research method using the analysis of growth and contribution by using a span of 5 years from 2009 to 2013. The results can be concluded that the revenue Pekanbaru area that has growth and enormous contribution Balance Fund, which is then followed by the PAD and the latter is another income -Other legitimate. This is because the government has not Pekanbaru City inability to manage PAD well, so it is still causing Pekanbaru city still depends on income Balance Fund / assistance from the central government.

Keywords: *Regional Revenue, PAD, DBH Other income*

ABSTRAK

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya. Dimana tingkat pendapatan daerah dapat mnenggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, secara dominan sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah, maka dari itu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan dan kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Metode penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan dan kontribusi dengan menggunakan rentang waktu 5 tahun mulai tahun 2009 hingga 2013. Dengan hasil dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah Pekanbaru yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar adalah Dana Perimbangan dengan yang kemudian PAD dan yang terakhir pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini disebabkan oleh belum mampunya pemerintah kota pekanbaru untuk mengelolah PAD-nya dengan baik, sehingga masih menyebabkan Kota Pekanbaru masih tergantung pada pendapatan dana perimbangan/bantuan dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Pendapatan Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Pendapatan lain-lain

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain – Lain yang Sah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD-nya. Hal ini disebabkan dalam undang-undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Enggar D.P.A, Sri Rahayu, Wahyuni (2011) dan Dian Mustika Wardani (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan jenis pendapatan daerah, lokasi penelitian, dan periode penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan lokasi di Jambi dan Sukoharjo dengan periode 2005-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lokasi yaitu Kota Pekanbaru dengan periode 2009-2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009;132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: (1) Pajak daerah (2)Retribusi daerah (3)Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (4)Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: “Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan ke Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup: (a) Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat (b) Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD (c) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah (d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota (e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No 81, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau.

Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan, Pendapatan Lain-lain yang Sah Kota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam mengolah keuangan daerahnya, dan menerapkan konsep perhitungan kontribusi yaitu dengan menghitung kedua rasio dari tiap-tiap pos dalam target dan realisasi anggaran pendapatan tahun 2009 s/d 2013. Sifat penelitian ini adalah replikatif.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru dengan memfokuskan untuk membahas PAD, Dana Perimbangan dan, Pendapatan Lain-lain yang Sah Kota Pekanbaru Tahun 2009 s/d 2013. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data kuantitatif yang digunakan adalah laporan target dan realisasi anggaran PAD, Dana Perimbangan dan, Pendapatan Lain-lain Kota Pekanbaru mulai dari tahun 2009 s/d 2013, serta data – data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru, dan Laporan Keuangan Kota Pekanbaru yang sudah diaudit/ diperiksa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data – data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : (1) Tingkat data target dan realisasi PAD Kota Pekanbaru Thn. 2009 – 2013 (2) Tingkat data target dan realisasi Dana Perimbangan Kota Pekanbaru Thn. 2009 – 2013 (3) Tingkat data target dan realisasi Pendapatan Lain Lain yang Sah Kota Pekanbaru Thn. 2009 – 2013 (4) Tingkat data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Metode Analisis data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam mengelolah dan menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan deskriptif dan bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dikumpul dan kemudian dianalisis, dengan menggunakan:

Analisis Deskriptif Statistik

Dimana proses deskriptif meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan yang hasilnya disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga akhirnya mengarah keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar Pertumbuhan dan Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan, Pendapatan Lain-lain yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu dalam suatu *series* selama periode tahun 2009 s/d 2013 (*time series*) perhitungan kontribusi menurut Sugiyono (2011) adalah sebagai berikut :

Analisis Kontribusi

Pertumbuhan Dan Rasio (Trend)

<u>Realisasi Satu Tahun – Realisasi Tahun Sebelumnya</u>		
Realisasi	Tahun	Sebelumnya
$X 100\%$		

Kontribusi Per Jenis Pendapatan Daerah

<u>Realisasi Per Jenis Pendapatan Daerah</u>			
Total	Realisasi	Pendapatan	Daerah
$X 100\%$			

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota di Indonesia yang perkembangannya cukup pesat. Pekanbaru yang dahulunya merupakan sebuah dusun dikepalai oleh seorang kepala suku yang dikenal dengan sebutan Batin. Dusun perladangan tersebut berkembang menjadi perkampungan yang dikenal dengan nama Senapelan. Dari catatan sejarah menyebutkan Dusun Senapelan berpindah ketepi Muara Sungai Siak yang kemudian dikenal dengan nama Dusun Payung Sekaki. Sebutan nama Senapelan lebih di kenal dibandingkan dengan sebutan nama Payung Sekaki.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di senapelan, beliau membangun istana di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang (Pasar Bawah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan Musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “**Pekan Baharu**” selanjutnya diperingati sebagai hari bermulanya Kota Pekabaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan “**Pekan Baharu**”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Kota Pekanbaru saat ini dipimpin oleh seorang WALIKOTA “ **H. FIRDAUS, ST, MT** untuk periode kepemimpinan 25 Januari 2012 sampai dengan 24 Januari 2017.

Jenis Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melihat pengklasifikasi dari PAD dan seberapa besar pertumbuhan (*trend*) beserta kontribusi per PAD Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan ke Pendapatan Daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

a. Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel 1
Pertumbuhan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	Ratio Pertumbuhan Pajak daerah
2009	69,865,355,922		
		10,252,509,214	14.67%
2010	80,117,865,136		
		64,973,012,206	81.10%
2011	145,090,877,342		
		76,901,737,485	53.00%
2012	221,992,614,827		
		23,982,535,182	10.80%
2013	245,975,150,009		

Sumber : Data olahan 2016

Pada tabel 1 merupakan pertumbuhan pajak daerah Kota Pekanbaru dimana pada tahun 2009 – 2010 terdapat pertumbuhan pajak daerah sebesar 10,252,509,214 dengan ratio pertumbuhan sebesar 14.67 %, namun pada tahun 2010 – 2011 pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 64,973,012,206 dengan ratio pertumbuhan sebesar 81.10 %, namun pada tahun 2011 – 2012 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 76,901,737,485 dengan ratio pertumbuhan sebesar 53.00 %, namun hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012 – 2013 pertumbuhan pajak daerah juga mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 23,982,535,182 yang hanya memiliki ratio pertumbuhan hanya sebesar 10.80 %.

Kontribusi Pajak Daerah

Tabel 2
Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2009	69,865,355,922	129,859,000,000	53.80%
2010	80,117,865,136	158,580,000,000	50.52%
2011	145,090,877,342	223,231,000,000	65.00%
2012	221,992,614,827	309,534,000,000	71.72%
2013	245,975,150,009	368,031,000,000	66.84%

Sumber : data olahan 2016

Tabel 2 terdapat kontribusi pajak daerah terhadap PAD tiap tahunnya memiliki kontribusi yang cukup besar dimana pajak daerah mencapai tingkat kontribusi antara 50,52 % hingga 71,72 % hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran utama dalam pembangunan otonomi daerah. Namun hal menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi yang sangat fluktuatif hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan jenis pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Tabel 3
Pertumbuhan Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan
2009	129,859,000,000		
		28,721,000,000	22.12%
2010	158,580,000,000	-	
		64,651,000,000	40.77%
2011	223,231,000,000	-	
		86,303,000,000	38.66%
2012	309,534,000,000	-	
		58,497,000,000	18.90%
2013	368,031,000,000	-	

Sumber : data olahan 2016

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pada tabel 3, merupakan tingkat pertumbuhan retribusi daerah selama lima tahun (2009 – 2013) yaitu pada tahun 2009 – 2010 retribusi daerah memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 15,459,637,571 atau sebesar 35.38 %, namun pada tahun 2010 – 2011 tingkat pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 1,779,585,714 atau sebesar (3.01 %), hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011 – 2012 tingkat pertumbuhan sebesar 2,248,548,117 dengan ratio pertumbuhan - 3.92 %, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 – 2013 terdapat tingkat pertumbuhan sebesar 20,313,452,211 dengan tingkat ratio sebesar 36.85 %. Jika dilihat dari pertumbuhannya penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru belum mampu untuk mengelolah retribusi dengan efektif , tetapi jika pemerintah dapat meningkatkan PAD dari retribusi maka hal itu akan dapat meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat Kota Pekanbaru.

Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

Tabel 4
Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi
2009	43,689,809,133	129,859,000,000	33.64%
2010	59,149,446,704	158,580,000,000	37.30%
2011	57,369,860,990	223,231,000,000	25.70%
2012	55,121,312,873	309,534,000,000	17.81%
2013	75,434,765,084	368,031,000,000	20.50

Sumber : Data olahan 2016

Pada tabel 4 terdapat tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dimana pada tahun 2009 kontribusi daerah sebesar 33.64% ,pada tahun 2010 tingkat kontribusi Retribusi Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 37.30%, sementara kontribusi dua tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu sebesar 25.70% dan 17.81%, sementara itu pada tahun 2013 tingkat kontribusi Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 20.50%.

Maka dengan demikian retribusi memiliki peran yang cukup besar dalam pembangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Namun hal yang sama juga terjadi pada retribusi, dimana retribusi daerah juga memberikan kontribusi yang fluktuatif hal ini disebabkan adanya penghapusan dan juga penambahan jenis retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Namun pemerintah selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk membayar dengan tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan dan mandiri.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden yang dibagikan oleh perusahaan atau badan milik daerah dan untuk melihat lebih jelas rincian tentang pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Pertumbuhan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Pertumbuhan	
		Rp	%
2010	2,483,752,834.00		
		607,250,315	24.45%
2011	3,091,003,149.00		
		-	
		591,349,245	-19.13%
2012	2,499,653,904.00		
		601,567,781	24.07%
2013	3,101,221,685.00		

Sumber: Data Olahan 2016

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2009 – 2010 memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 117,651,393.00 atau setara dengan ratio sebesar 4.97 %, pada tahun 2010 – 2011 pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun ini pendapatan mencapai 607,250,315.00, dengan tingkat ratio sebesar 24.45 %, namun pada tahun 2011 – 2012 hal yang terjadi merupakan hal yang sebaliknya dimana pada tahun ini Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan yang sangat berarti yaitu sebesar (591,349,245.00) dengan tingkat ratio sebesar (19.13) %, namun pada tahun 2012 – 2013 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 601,567,781.00 dengan tingkat ratio sebesar 24.07 %.

Kontribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 6
Kontribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Realisasi PAD	Kontribusi
2009	2,366,101,441.00	129,859,000,000.00	1.82%
2010	2,483,752,834.00	158,580,000,000.00	1.57%
2011	3,091,003,149.00	223,231,000,000.00	1.38%
2012	2,499,653,904.00	309,534,000,000.00	0.81%
2013	3,101,221,685.00	368,031,000,000.00	0.84%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam 5 tahun hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil yaitu hanya berkisar antara 0.81 % hingga 1.82 %. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah belum dapat memberikan dampak yang besar dalam membangun perekonomian daerah di Kota Pekanbaru hal ini disebabkan oleh belum mampunya pemerintah daerah dalam menggali pengelolaan kekayaan daerah yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

Lain – Lain PAD yang sah Pertumbuhan Lain – Lain PAD yang Sah

Tabel 7
Pertumbuhan Lain – Lain PAD yang Sah

Tahun	Realisasi Pendapatan Lain – Lain PAD yang Sah	Pertumbuhan
-------	--	-------------

		Rp	%
2009	12,127,480,013.00		
		4,391,887,879	36.21%
2010	16,519,367,892.00		
		1,160,462,643	7.02%
2011	17,679,830,535.00		
		10,089,527,058	57.07%
2012	27,769,357,593.00		
		15,095,912,469	54.36%
2013	42,865,270,062.00		

Sumber : Data Olahan 2016

Pada tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Lain – Lain PAD yang Sah bahwa pada tahun 2009 – 2010 memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,391,887,879 atau setara dengan ratio sebesar 36.21%, pada tahun 2010 – 2011 pertumbuhan Lain – Lain PAD yang sah mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 1,160,462,643 dengan tingkat ratio sebesar 7.02%, pada tahun 2011 – 2012 pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun ini mencapai 10,089,527,058 dengan tingkat ratio sebesar 57.07%,namun pada tahun 2012 – 2013 hal yang sama juga terjadi yaitu tingkat pertumbuhan Lain – Lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 15,095,912,469 dengan ratio pertumbuhan sebesar 54.36%.

Kontribusi Lain – Lain PAD yang Sah

Tabel 8
Kontribusi Lain – Lain PAD yang Sah

Tahun	Realisasi Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah	Realisasi PAD	Kontribusi
2009	12,127,480,013.00	129,859,000,000.00	9.34%
2010	16,519,367,892.00	158,580,000,000.00	10.42%
2011	17,679,830,535.00	223,231,000,000.00	7.92%
2012	27,769,357,593.00	309,534,000,000.00	8.97%
2013	42,865,270,062.00	368,031,000,000.00	11.65%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi dari lain – lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang sangat kecil, hal ini disebabkan pendapatan lain – lain PAD yang sah berasal dari beberapa jenis diantaranya merupakan denda pajak maupun denda retribusi dan lain - lain, sementara sebagian besar masyarakat Pekanbaru selalu enggan untuk membayar denda, sehingga masyarakat kota pekanbaru memilih untuk membayar sebagian besar iuran sebelum jatuh tempo sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang lebih.

Pertumbuhan dan Kontribusi PAD

Tabel 9
Pertumbuhan PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	
		Rp	%
2009	129,859,000,000.00		
		28,721,000,000.00	22.12%
2010	158,580,000,000.00	-	
		64,651,000,000.00	40.77%
2011	223,231,000,000.00	-	
		86,303,000,000.00	38.66%
2012	309,534,000,000.00	-	
		58,497,000,000.00	18.90%
2013	368,031,000,000.00	-	

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD pada tahun 2009 - 2010 memiliki pertumbuhan sebesar 28,721,000,000.00 atau sama dengan ratio pertumbuhan 22.12%, sementara pada tahun 2010 – 2011 mengalami peningkatan dimana rasio mencapai 40.77 %, namun pada tahun 2011 – 2012 hal yang terjadi malah sebaliknya pertumbuhannya mengalami penurunan dengan ratio sebesar 38.66 %, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012 – 2013 dengan memiliki ratio sebesar 18.90 %

Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 10
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2009 – 2013)
(dalam jutaan)

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi
2009	129,859	176,867	1,007,029.79	12.90%
2010	158,580	208,080	1,183,102.67	13.40%
2011	223,231	234,003	1,632,503.95	13.67%
2012	309,534	424,526	1,844,882.59	16.78%
2013	368,031	381,314	1,992,716.61	18.47%

Sumber : Data Olahan 2016

Pada Tabel 10 terlihat dengan jelas bahwa kontribusi PAD terbesar yang dihasilkan adalah pada tahun 2013 sebesar 18.47 % sementara yang memberikan kontribusi terkecil terdapat pada tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 12.90 %. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan jelas pada grafik dibawah ini.

Dengan kata lain bahwa ternyata untuk kota pekanbaru PAD memberikan kontribusi yang fluktuatif hal ini disebabkan adanya dari beberapa jenis PAD yang dihapus / tidak diberlakukan lagi (instruksi Gubernur Riau No.5 Tahun 1998), karena kurangnya peran serta dari masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Namun meskipun pemerintah menetapkan bahwa adanya pelimpahan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (PPHTB), dimana data pelimpahan tersebut ketika diserahkan ke Pemerintah daerah kota pekanbaru tanpa verifikasi terlebih dahulu, sehingga banyak data yang salah dan keliru, Tetapi meskipun demikian pemerintah daerah kota pekanbaru tetap berusaha untuk meningkatkan PAD yang dapat digali lagi agar dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Kota Pekanbaru untuk menjalankan otonomi daerah.

Pendapatan Dana Perimbangan Kontribusi Pendapatan Dana Perimbangan

Tabel 11
Kontribusi Pendapatan Dana Perimbangan

(dalam jutaan)

Tahun	Realisasi Dana Perimbangan	Target Dana Perimbangan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi
2009	860,285.02	777,080	1,007,029.79	85.43%
2010	923,772.16	878,613	1,183,102.67	78.08%
2011	1,149,913.97	10,643,190	1,632,503.95	70.44%
2012	1,523,156.94	1,380,898	1,844,882.59	82.56%
2013	1,614,587.61	1,729,698	1,992,716.61	81.02%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Dana Perimbangan kontribusi yang sangat besar seperti pada tahun 2009 memiliki kontribusi sebesar 85.43 %,namun pada tahun 2010 dan tahun 2011 Dana perimbangan dana perimbangan mengalami penurunan, tingkat kontribusi sebesar 78.08 % dan 70.44 %,sedangkan pada tahun 2012 Pendapatan Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 82.56 %, tapi pada tahun 2013 Pendapatan Dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar 81.02 %. Untuk Kota Pekanbaru dana perimbangan merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terbesar, hal ini disebabkan oleh pemerintah belum memiliki dana yang cukup untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan mengandalkan dana dari daerah sehingga masih tergantung pada dana dari pusat. Namun jika suatu daerah sudah didesentralisa maka menjadi kewajiban daerah untuk mengelola keuangan sendiri.

Lain – Lain Pendapatan yang Sah
Kontribusi Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Tabel 12
Kontribusi Pendapatan Lain – Lain yang Sah Kota Pekanbaru (2009 – 2013)
(dalam jutaan)

Tahun	Realisasi Pendapatan Lain - Lain yang Sah	Target Pendapatan Lain - Lain yang Sah	Realisasi Pendapatan Daerah	Kontribusi
2009	16,885.76	140,434	1,007,029.79	1.68%
2010	100,750.51	247,715	1,183,102.67	8.52%
2011	259,358.97	296,344	1,632,503.95	15.89%
2012	12,191.64	13,660	1,844,882.59	0.66%
2013	10,098	35,683	1,992,716.61	0.51%

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pendapatan Lain – Lain yang sah hanya manpu memberikan kontribusi antara 0.51% hingga 15.89 %, dengan kata lain diantara beberapa unsur Pendapatan Daerah bahwa yang memberikan kontribusi terkecil adalah Pendapatan Lain-lain yang sah. Dimana untuk pendapatan lain – lain yang sah terdiri dari dana hibah dan dana darurat. Dana Hibah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan / lembaga asing, badan / lembaga internasional, Pemerintah, badan / lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk Kota Pekanbaru PAD memberikan kontribusi yang fluktuatif hal ini disebabkan adanya dari beberapa jenis PAD yang dihapus/tidak diberlakukan lagi (instruksi Gubernur No.5 Tahun 1998) karena kurangnya peran serta dari masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Tetapi meskipun demikian pemerintah daerah kota pekanbaru tetap berusaha untuk meningkatkan PAD yang dapat digalih lagi agar dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan pamarintahan Kota Pekanbaru untuk menjalankan otonomi daerah.

Untuk Kota Pekanbaru Dana Perimbangan, merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terbesar, hal ini disebabkan karena Kota Pekanbaru belum memiliki dana cukup untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan mengandalkan sumber dana dari daerah, sehingga masih tergantung pada dana dari pusat. Namun jika sudah didesentralisi maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri.

Sementara tingkat pertumbuhan Pendapatan lain-lain yang sah memiliki rasio sebesar 496.66% merupakan pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2009–2010, sementara pertumbuhan yang terkecil terdapat pada tahun -95.30% yang terdapat pada tahun 2011 –

2012. Sementara kontribusi dari pendapatan Lain-lain yang sah hanya manpu memberikan kontribusi antara 0.51% hingga 15.89 %, dengan kata lain diantara beberapa unsur Pendapatan Daerah bahwa yang memberikan kontribusi terkecil adalah Pendapatan Lain – Lain yang sah.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Saran – saran tersebut antara lain: Pemerintah Daerah dan untuk peneliti selanjutnya perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, eksplorasi sumber daya alam yang lebih banyak lagi dan skema pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor agar dapat menurunkan ketergantungan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat. Dan mengutamakan Belanja Daerah untuk keperluan yang produktif, membangun serta mensejahterakan penduduk Kota Pekanbaru. Sehingga dari perkembangan perekonomian daerah yang baik akan secara otomatis berdampak pada peningkatan PAD. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda. Dan pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam dengan menambah variabel independen atau variabel dependen lain baik dari segi ukuran atau jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non- keuangan seperti kebijakan pemerintah, aspek politik dan aspek penganggaran pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Erlangga: Jakarta
- Mahsun,dkk.2006. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. yogyakarta.: BPFE.
- Mardiosmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. ANDI : Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama.: Bandung.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Retribusi Daerah.
- _____.Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- _____. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Siahan,Marihot pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi*. Rajawali pers : Jakarta.
- Sugiyono. 2011.*Statistika untuk penelitian*. Alfabeta: Bandung